



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DOKUMEN
MITIGASI RISIKO LALU LINTAS HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DOKUMEN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS HASIL PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

Plt. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

HARI MARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DOKUMEN MITIGASI RISIKO LALU
LINTAS HASIL PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan produksi perikanan budidaya dari 7,34 juta ton di tahun 2020 menjadi 10,32 juta ton pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 8,5 % per tahun. Strategi dalam mengoptimalkan perikanan budidaya antara lain melalui pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Sampai saat ini faktor utama yang menjadi penghalang keberhasilan budidaya adalah adanya serangan penyakit atau outbreak. Berbagai penyakit yang telah ada belum sepenuhnya dapat diatasi, telah muncul penyakit baru yang dapat mengakibatkan gagalnya produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Salah satu faktor penyebab penyebaran penyakit antar wilayah negara yaitu adanya lalu lintas perdagangan antar negara. Perdagangan internasional ikan dan produk hasil ikan secara umum telah memberikan keuntungan bagi kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain juga berpotensi menyebarkan mikroorganisme patogen ke seluruh dunia. Potensi penularan penyakit lewat perdagangan dapat diantisipasi dengan tindakan pencegahan yang dilakukan baik oleh negara pengekspor maupun negara pengimpor.

Upaya perlindungan sumber daya ikan dan kelangsungan budidaya ikan dari serangan penyakit ikan yang berpotensi masuk dan tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat kegiatan lalu lintas hasil perikanan, dilakukan melalui penyelenggaraan karantina. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyatakan bahwa penyelenggaraan karantina ikan diantaranya adalah untuk mencegah masuknya HPIK/HPI Tertentu dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya HPIK/HPI Tertentu dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat penyelenggaraan karantina ikan di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Kemudian tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan diemban oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari). Adapun pelaksanaan teknis penyelenggaraan karantina ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Salah satu bentuk tanggung jawab Puskari dalam pelaksanaan tugasnya adalah dengan melaksanakan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan diantaranya pada lalu lintas impor. Mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan impor dilakukan melalui identifikasi, analisis dan evaluasi potensi risiko, serta melakukan penilaian tingkat pencegahan pemasukan dan/penyebaran HPIK terhadap tindakan karantina impor yang dilakukan oleh UPT KIPM. Selanjutnya dirumuskan strategi atau

tindakan perbaikan untuk mengurangi potensi risiko masuk dan tersebarnya HPIK/HPI Tertentu.

Keluaran dari kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan telah dirumuskan menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Puskari, dengan target capaian berupa dokumen mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi. Oleh karena itu untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan, dan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan maka Puskari perlu menyusun Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu lintas Hasil Perikanan.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan adalah untuk memberi acuan bagi:

- a. Pusat dan UPT KIPM dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi, serta acuan dalam mengukur tingkat capaiannya; dan
- b. Pusat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh proses dan hasil tindakan karantina yang dilakukan UPT KIPM.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah tercapainya target IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan yang telah ditetapkan dalam manual IKU melalui:

1. penyusunan NSPK mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi;
2. penyusunan laporan tanggap darurat apabila terdapat kasus wabah penyakit ikan di suatu wilayah;
3. penyusunan laporan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya; dan
4. penyusunan analisis/penilaian risiko penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu.

BAB II

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Nama Indikator

Dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan.

B. Makna Indikator

Dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan adalah dokumen berupa petunjuk teknis, laporan penelusuran *outbreak*/kasus penyakit, laporan monitoring dan penelusuran induk dan benih pasca pemasukan, dan dokumen analisis/penilaian risiko penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu.

C. Alasan Pemilihan Indikator

Alasan pemilihan indikator adalah:

1. Pengendalian penyakit oleh UPT KIPM khususnya pada tindakan karantina impor belum sepenuhnya mampu mencegah pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI tertentu dengan kata lain masih terdapat potensi risiko atau dampak risiko sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko untuk mengetahui capaian tingkat pengendalian, hambatan, permasalahan maupun perbaikan dalam pelaksanaan tindakan karantina sehingga potensi risiko tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan; dan
2. Mendukung program Kampung Perikanan Budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui budidaya produk unggulan dan/atau produk lokal.

D. Pengumpulan Data

Data capaian IKU dikumpulkan setiap kali komponen kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan diselesaikan dan tersusun dokumen laporan yang telah ditargetkan.

1. Penyusunan petunjuk teknis

Data capaian adalah dokumen Petunjuk Teknis Pencapaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) level 2 Pusat Karantina Ikan.

2. Tanggap darurat terkait *outbreak* penyakit ikan
Data capaian berupa dokumen laporan kompilasi kegiatan tanggap darurat terhadap adanya kasus wabah/*outbreak* penyakit ikan di suatu wilayah. Kegiatan dilakukan berdasarkan laporan dan tindak lanjut adanya kasus penyakit. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan bersama-sama oleh tim atau satuan gugus tugas pengendalian penyakit ikan nasional yang melibatkan berbagai instansi terkait.
3. Monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung budidaya
Data capaian berupa dokumen laporan monitoring dan penelusuran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data kondisi dan hasil pembudidayaan, asal usul benih dan induk serta keterkaitannya dengan tindakan karantina yang telah dilakukan.
4. Analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu
Data capaian berupa hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu. Analisis/penilaian risiko mengacu pada pedoman yang berlaku dan berdasarkan referensi ilmiah atau hasil penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional.

E. Penghitungan Capaian IKU

Target capaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi. Realisasi capaian IKU dihitung setiap triwulan, yaitu dengan menghitung jumlah keluaran dari setiap kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan impor, yang berupa dokumen:

1. Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil perikanan;
2. Laporan kegiatan tanggap darurat apabila terdapat wabah penyakit ikan di suatu wilayah;
3. Laporan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung budidaya; dan
4. Naskah analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu.

BAB III

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. Pola Dasar

Pola dasar IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan dititik beratkan pada data-data hasil tindakan karantina ikan impor dan kemampuan UPT KIPM dalam melakukan pengendalian atau pencegahan masuk atau tersebarnya HPIK/HPI tertentu. Pola dasar kegiatan mitigasi risiko dirancang untuk dapat mencapai sasaran dan output IKU melalui:

1. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila terdapat adanya laporan kasus wabah/*outbrek* penyakit ikan. Hal ini dilakukan untuk melakukan penanganan dan penelusuran penyebab serta keterkaitannya dengan proses tindakan karantina di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran.
2. Melakukan kegiatan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung budidaya. Hal ini dilakukan untuk mendukung program KKP untuk meningkatkan produksi hasil perikanan dan untuk melakukan pelacakan/penelusuran (*tracing*) terhadap hasil tindakan karantina di lokasi budidaya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian proses kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi.
3. Menyusun analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu dilakukan untuk menentukan potensi risiko media pembawa. Hasil analisis/penilaian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dalam rangka pencegahan pemasukan HPIK/HPI tertentu.
4. Penyediaan anggaran di tahun berjalan, kegiatan baik di Pusat atau di UPT KIPM dalam rangka pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi.

B. Strategi Pelaksanaan

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan melalui:

1. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pencapaian IKU sebagai acuan dalam pelaksanaan mitigasi risiko, sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai tujuan dan sasaran;
2. Pelaporan kegiatan tanggap darurat apabila terdapat kasus wabah/*outbreak* penyakit ikan di suatu wilayah:
 - a. Berkoordinasi dengan DJPB/UPT KIPM/BUSKIPM atau instansi terkait lainnya; dan
 - b. Berkoordinasi dengan pembudidaya/*hatchery*/IKI.
3. Pelaporan hasil monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya:
 - a. Melakukan kerjasama/koordinasi dengan pembudidaya/*hatchery*/IKI untuk dapat secara terbuka memberikan akses data terkait kegiatan importasi dan distribusi Media Pembawa hasil importasi; dan
 - b. Koordinasi dengan UPT di wilayah kampung perikanan budidaya.
4. Penyusunan hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu
 - a. Menyusun analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu berdasarkan referensi ilmiah atau hasil penelitian yang relevan;
 - b. Mengkomunikasikan hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu; dan
 - c. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan berdasarkan hasil analisis/penilaian risiko tersebut.

C. Komponen kegiatan

Komponen kegiatan yang mendukung IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan meliputi:

1. Penyediaan NSPK Mitigasi Risiko Lalu lintas Media Pembawa Pada Kegiatan Importasi;
2. Sosialisasi/koordinasi/workshop terkait mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan;
3. Pengumpulan data terkait importasi, data surveilan, data SDM dan data akreditasi secara elektronik melalui sisterkaroline, aplikasi SIKI online dan email;

4. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat terkait *outbreak* penyakit ikan (penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina / penyakit ikan tertentu di wilayah RI);
5. Koordinasi dengan UPT KIPM, DJPB dan instansi terkait lainnya, serta *stakeholder* (pembudidaya/*hatchery*/IKI);
6. Monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya;
7. Penyusunan analisis/penilaian risiko HPIK/HPI Tertentu;
8. Komunikasi risiko hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI Tertentu; dan
9. Rekomendasi bahan kebijakan dari hasil analisis/penilaian risiko.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu lintas Hasil Perikanan meliputi:

1. Penyusunan NSPK Mitigasi Risiko Lalu lintas Hasil Perikanan;
2. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat terkait *outbreak* penyakit ikan (Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina / penyakit ikan tertentu di wilayah RI);
3. Pelaksanaan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung budidaya; dan
4. Penyusunan analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Dalam rangka pencapaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan, perlu dilakukan perencanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan di Pusat
 - a. Menetapkan Target capaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan;
 - b. Menyiapkan anggaran kegiatan dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan;
 - c. Menyusun Petunjuk Teknis Pencapaian IKU sebagai acuan dalam pelaksanaan mitigasi risiko;
 - d. Melakukan sosialisasi terkait pencapaian IKU kepada UPT KIPM;
 - e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. Penetapan Tim Pelaksana;
 - g. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat apabila terjadi *outbreak*/ wabah penyakit; dan
 - i. Mengumpulkan informasi/data/referensi situs online/website untuk penyusunan analisis/penilaian risiko HPIK//HPI tertentu.
2. Perencanaan UPT KIPM
 - a. Menyiapkan anggaran kegiatan tanggap darurat terkait *outbreak* penyakit, monitoring dan penelusuran induk dan benih pasca pemasukan;
 - b. Menetapkan Tim Pelaksana untuk melakukan kegiatan pencapaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat apabila terjadi *outbreak*/ wabah penyakit; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder di kampung perikanan budidaya.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan di UPT KIPM

a. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat wabah penyakit/*outbreak*

Tingkat keberhasilan proses tindakan karantina dapat dilihat dari hasil pemeriksaan media pembawa di area budidaya yang berasal dari lalu lintas impor atau antar area. Jika terdapat wabah penyakit ikan, maka penting untuk dilakukan penelusuran terhadap penyebab penyakit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab penyakit tersebut, apakah disebabkan oleh tindakan karantina impor yang masih kurang sesuai atau oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor lingkungan, penanganan, pakan dan pengelolaan budidaya lainnya. Hasil penelusuran ini sangat penting untuk mengetahui penyebab atau akar masalah sehingga menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan dapat dilakukan.

Kegiatan tanggap darurat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan/atau contoh uji terkait wabah, meliputi:

1) Kronologis

UPT KIPM menyampaikan kejadian wabah penyakit pada budidaya ikan di wilayah kerjanya kepada Pusat UPT KIPM dengan memuat kronologis, yang berisi informasi:

- a) Tempat dan waktu kejadian;
- b) Asal benih/ikan;
- c) Pemilik;
- d) Jenis ikan;
- e) Umur/ukuran ikan;
- f) Jenis pakan;
- g) Gejala klinis;
- h) Mortalitas dan morbiditas;
- i) Kondisi lingkungan;
- j) Luasan area budidaya di wilayah wabah;
- k) Prosentase area yang terinfeksi;
- l) Pengelolaan lingkungan sebelum terjadinya wabah;
- m) Pemeliharaan pada saat terjadi wabah;

- n) Uraian kejadian;
 - o) Tindakan yang telah dilakukan setelah terjadi wabah;
dan
 - p) Informasi lain yang relevan.
- 2) Investigasi Lapangan
- a) Pengumpulan data
Kegiatan tanggap darurat wabah penyakit ikan yang dilaksanakan UPT pada saat investigasi lapangan merujuk pada Lampiran 1.
 - b) Pengambilan dan pemeriksaan contoh uji
Pemeriksaan contoh uji dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pengambilan contoh uji perlu dilakukan sebagai konfirmasi untuk menentukan secara pasti jenis penyakit penyebab terjadinya wabah. Pengambilan contoh uji sebaiknya dilakukan terhadap ikan (jika masih ada), air, pakan dan tanah/lumpur di area budidaya (tambak/kolam/hatchery) dan di lingkungan sekitar budidaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya kemungkinan bahwa penyebab penyakit disebabkan oleh faktor lingkungan atau lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa timbulnya penyakit tidak hanya terjadi karena penularan penyakit (*patogen*);
 - (2) Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap ikan, air, pakan dan lumpur yang berasal dari area tambak/kolam/ hatchery yang terinfeksi wabah dan lingkungan diluar area tambak/kolam;
 - (3) Target pemeriksaan HPIK/HPI tertentu pada tanggap darurat wabah ditentukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan hasil anamnesa atau rekomendasi Pusat;
 - (4) Melakukan subkontrak pengujian dalam hal UPT KIPM belum mampu atau pengujian penyakit belum masuk ruang lingkup terakreditasi ISO/IEC 17025; dan

- (5) Pengambilan contoh uji dan laporan hasil pengujian tersebut dilakukan dengan mempergunakan form sebagaimana pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.
 - 3) Penelusuran ke UPT KIPM lain
Dalam hal hasil anamnesa menunjukkan bahwa ikan yang terinfeksi HPIK diketahui berasal dari Wilayah Kerja UPT KIPM lain, maka segera diinformasikan kepada Pusat untuk dilakukan penelusuran di UPT KIPM tempat asal ikan. Tim Pusat melakukan koordinasi dengan UPT terkait untuk melakukan penelusuran dan tindak lanjut kasus tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi masing-masing UPT KIPM melakukan tindak lanjut sesuai hasil penelusuran.
 - 4) Menyusun laporan kegiatan penelusuran wabah penyakit (tanggap darurat)
Tim Pelaksana UPT KIPM melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat ke Pusat untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kegiatan. Format laporan sebagaimana pada Lampiran 4.
 - b. Melaksanakan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pembudidaya/hatchery/IKI untuk dapat secara terbuka memberikan akses data terkait kegiatan importasi dan distribusi Media Pembawa hasil importasi; dan
 - 2) Mengumpulkan dan/atau membantu pengumpulan data terkait Monitoring dan Penelusuran Induk dan Benih Ikan Pasca Pemasukan. Format kuisisioner sebagaimana pada Lampiran 5.
2. Pelaksanaan di Pusat
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis Pencapaian IKU sebagai acuan dalam pelaksanaan Mitigasi Risiko Impor, sehingga dapat memperoleh data dan informasi sesuai standar yang diperlukan;

- b. Melakukan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Mitigasi Risiko kepada UPT KIPM agar pelaksanaan dapat dilakukan sesuai acuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila terdapat kasus wabah penyakit ikan di suatu wilayah:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti DJPB, BUSKIPM, UPT KIPM dan pembudidaya/*hatchery*/IKI dalam rangka penanganan/tindak lanjut *outbreak*/wabah penyakit;
 - 2) Menyusun rencana aksi dalam rangka penanganan/ penelusuran wabah penyakit ikan. Penelusuran dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan format pada Lampiran 1;
 - 3) Menetapkan Tim Pelaksana Aksi;
 - 4) Melakukan verifikasi data di UPT KIPM tujuan apabila diperlukan atau terdapat kasus wabah penyakit di Wilayah Kerja UPT KIPM tujuan distribusi Media Pembawa hasil importasi atau turunannya (ikan/benur/induk/calon induk);
 - 5) Melakukan analisis hasil kegiatan tanggap darurat wabah oleh Tim Pusat, UPT KIPM atau pihak lain yang terlibat; dan
 - 6) Menyusun laporan tanggap darurat yang antara lain mencakup penyebab terjadinya *outbreak* dan keterkaitannya dengan proses importasi induk/calon induk. Laporan sebaiknya disertai dengan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi *outbreak* kembali.
- d. Melaksanakan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* (kawasan budidaya) dan kampung perikanan budidaya
 - 1) Melakukan pelacakan/penelusuran (tracing) terhadap ikan yang dibudidayakan di lokasi budidaya. Penelusuran antara lain meliputi asal benih (*hatchery*) dan asal induk;
 - 2) Melakukan penelusuran terhadap kondisi di lapangan (tempat pembudidayaan) dengan proses dan tindakan karantina yang telah dilakukan oleh UPT KIPM di tempat

pemasukan dan tempat pengeluaran apabila benih berasal dari daerah lain dan melalui proses sertifikasi kesehatan ikan oleh UPT KIPM;

- 3) Melakukan penelusuran terhadap kondisi di tempat pembenihan (hatchery) atau IKI dengan proses dan tindakan karantina yang telah dilakukan oleh UPT KIPM;
 - 4) Proses penelusuran dapat dimulai dari data sisterkaroline sebagai bahan untuk melakukan penelusuran terhadap pemasukan induk udang putih (*L. vannamei*); Asal induk, UPT pemasukan/UPT tempat transit, Perusahaan penerima dan apabila memungkinkan termasuk distribusi induk atau benih (benur); dan
 - 5) Mengumpulkan data dengan secara langsung ke lapangan, atau secara tidak langsung melalui elektronik (on desk) dengan mempergunakan format sesuai Lampiran 5.
- e. Menyusun analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu berdasarkan referensi ilmiah atau hasil penelitian yang relevan
- 1) Mengkomunikasikan hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu; dan
 - 2) Merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan berdasarkan hasil analisis/penilaian risiko tersebut.

C. Pendanaan

Pelaksanaan pencapaian IKK dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Tolok Ukur Keberhasilan

1. Tingkat Pusat

Terlaksananya seluruh kegiatan terkait mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi sesuai IKU dan tercapai target IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan yang telah ditetapkan.

2. Tingkat UPT KIPM

- a. Mampu melaporkan data terkait tindakan karantina impor sesuai waktu dan mekanisme yang ditetapkan;

- b. Mampu mengisi dan/atau melaporkan kuisioner mitigasi risiko importasi dengan benar sesuai jangka waktu dan mekanisme yang ditetapkan;
- c. Mampu menangani laporan adanya kasus wabah dengan baik;
- d. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Mampu melakukan tanggap darurat terhadap laporan adanya wabah penyakit di wilayah kerja UPT KIPM masing-masing dan menyusun laporan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- f. Mengikuti kegiatan yang terkait dengan kegiatan mitigasi risiko atau tindak lanjut hasil kegiatan mitigasi risiko; dan
- g. Mampu melakukan atau membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Tim pelaksana mitigasi risiko berkewajiban untuk segera melakukan pelaporan hasil kegiatan, hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui progres capaian IKU. Disamping itu data-data hasil kegiatan perlu segera dievaluasi untuk mengetahui potensi risiko dan tingkat pencegahan pemasukan atau penyebaran HPIK/HPI tertentu yang dilakukan oleh UPT KIPM serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil mitigasi risiko.

A. Pelaporan UPT KIPM

Tim Pelaksana di UPT KIPM melaporkan hasil kegiatan terkait mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi sesuai waktu dan mekanisme yang ditentukan pada masing-masing yaitu:

- a. Laporan data terkait tindakan karantina impor sesuai waktu yang ditetapkan (*real time*) pada aplikasi *Sisterkaroline*;
- b. Laporan surveilan oleh UPT KIPM mengacu pada Petunjuk teknis Surveilan HPIK/HPI Tertentu;
- c. Laporan kegiatan mitigasi risiko secara langsung (*on site*) atau tidak langsung (*on desk*) dilakukan dengan mengisi dan/atau menyampaikan kuisioner mitigasi risiko sesuai jangka waktu dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan;
- d. Laporan kegiatan tanggap darurat apabila terdapat kasus wabah penyakit ikan dilakukan sesuai jangka waktu dan mekanisme pelaporan yang ditentukan; dan
- e. Laporan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di *shrimp estate* dan kampung perikanan budidaya dilakukan sesuai jangka waktu dan mekanisme pelaporan yang ditentukan.

B. Evaluasi Tim Pusat

1. Evaluasi laporan atau hasil kegiatan tanggap darurat
 - a. Kesesuaian tindakan karantina, pengujian dan surveilan pada Media Pembawa hasil importasi dan turunannya (induk/calon induk atau benur yang terpapar *outbreak*/ wabah penyakit;

- b. Hasil pemeriksaan penyakit dapat dilakukan pada air, tanah/lumpur di area tambak/kolam dan di luar area;
 - c. Hasil pengujian terhadap kualitas air dan pemeriksaan.
 - d. Hasil evaluasi antara lain meliputi:
 - 1) kesesuaian tindakan karantina UPT KIPM baik di tempat kejadian wabah/*outbreak* atau di area asal/tempat pemasukan (induk/calon induk atau benur); dan
 - 2) Kesimpulan atau justifikasi penyebab terjadinya wabah/*outbreak*, dan keterkaitannya dengan proses importasi.
 - e. Rekomendasi dan tindak lanjut tanggap darurat
Rekomendasi disusun sebagai saran tindakan perbaikan oleh tim pelaksana/satgas tanggap darurat kepada para pemangku kepentingan sehingga potensi penyebaran HPIK/ HPI Tertentu ataupun terjadinya wabah kembali dapat dihindari.
2. Evaluasi hasil penelusuran induk dan benih
- a. Kesesuaian tindakan karantina, pengujian dan surveilan pada media pembawa hasil importasi dan turunannya (induk/calon induk atau benur) yang distribusikan ke wilayah kampung perikanan budidaya;
 - b. Hasil evaluasi antara lain meliputi:
 - 1) kesesuaian tindakan karantina UPT KIPM baik di wilayah kampung kerikanan budidaya atau di area asal/tempat pemasukan (induk/calon induk atau benur);
 - 2) kesesuaian penerapan biosekuriti di IKI ;
 - 3) potensi risiko di tempat pemasukan/pengeluaran dan di IKI; dan
 - 4) Saran atau rekomendasi sesuai permasalahan.
3. Tindak lanjut hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu berdasarkan referensi ilmiah atau hasil penelitian yang relevan
- a. Mengkomunikasikan hasil analisis/penilaian risiko HPIK/HPI tertentu; dan
 - b. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan berdasarkan hasil analisis/penilaian risiko tersebut.

C. Laporan Tim Pusat

a. Laporan Capaian IKU

Laporan capaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan disampaikan pada akhir tahun anggaran.

b. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan disusun segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan, disertai data atau bukti-bukti yang relevan.

c. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun berdasarkan Capaian IKU dan kegiatan yang telah dilakukan baik oleh Pusat maupun UPT KIPM.

BAB VI
PENUTUP

Capaian IKU dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan akan menggambarkan kinerja Puskari dan UPT KIPM dalam melakukan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa terutama pada kegiatan importasi. Di samping sebagai wujud tanggung jawab Puskari dan UPT KIPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanat penyelenggaraan karantina ikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada importasi juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait peningkatan produksi hasil perikanan strategis dan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tindakan karantina di pintu pemasukan (impor), kegiatan mitigasi risiko harus melibatkan berbagai pihak terkait, dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dengan UPT KIPM, instansi terkait seperti DJPB dan UPT DJPB di daerah, dinas terkait, serta pihak lainnya seperti importir, pengelola IKI/hatchery, petambak/pelaku usaha dan masyarakat perikanan lainnya. Kegiatan mitigasi risiko ini akan dapat dirasakan manfaatnya apabila hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi, FGD, pertukaran informasi atau publikasi keluaran dari kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa pada kegiatan importasi.

Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan ini diharapkan akan menjadi acuan sehingga kegiatan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan dapat berjalan dengan optimal dan pada akhirnya tercapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,

Plt. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

HARI MARYADI



Hari Maryadi

Lampiran 1. Kuisioner Tanggap Darurat (Penelusuran Wabah Penyakit di Area Budidaya

Kuisioner Tanggap Darurat (Penelusuran Wabah Penyakit di Area Budidaya

Nama :

Surat Tugas :

Tanggal :

A.	Data Umum		
	1. Nama Pemilik	:	
	2. Tempat/lokasi	:	
	3. Status sertifikasi CPIB		
	4. Waktu Kejadian	:	
	5. Nama Ikan	:	
	6. Umur	:	
	7. Populasi	:	
	8. Asal Ikan (nama hatchery, alamat)	:	
	9. Nomor HC (kalau dari luar daerah)	:	
	10. Morbiditas/mortalitas	:	
	11. Luas Area (wabah)	:	
	12. Luas area Budidaya		
	13. Informasi lainnya	:	
B	Gejala Klinis		
	1. Tingkah laku	:	
	2. Warna kulit	:	
	3. Daging	:	
	4. Usus/pencernaan dll	:	
	5. Carapace dan ekor	:	
	6. Hepatopancreas	:	
	7. Informasi lain yang relevan	:	
E.	Kondisi lingkungan		
	1. Sumber air/Perlakuan	:	
	2. Curah hujan	:	
	3. Suhu	:	
	4. pH	:	
	5. Kadar O ₂	:	

	6. Amoniak/ lainnya	:	
	7. Kekeruhan	:	
	8. Plankton	:	
	9. Metode budidaya	:	
	10. Informasi lain yang relevan	:	
F	Penerapan biosekuriti		
	1. Lingkungan	:	
	2. Sarana Prasarana	:	
	3. Personil	:	
	4. Media pembawa	:	
	5. SOP dan Rekaman	:	
	6. Informasi lainnya relevan	:	
F.	Diagnosa	:	
	Diferensial diagnosa	:	
G	Rujukan	:	
.			

Kota, Tgl/bulan/tahun

Pelaksana,

1. PHPI (.....ttd.....)
2. PHPI (.....ttd.....)

Lampiran 2. Pengambilan Contoh Uji Media Pembawa dalam rangka
Penelusuran Wabah Penyakit di Area Budidaya (Tanggap
Darurat)

Pengambilan Contoh Uji Media Pembawa

Nama Pembudidaya :
Alamat :
Tanggal :

No.	Jenis/bentuk contoh uji	Ukuran (cm)/ Umur (hari)	Jumlah contoh uji (ekor/ml)	Populasi	Target HPIK	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Kota, Tgl/bulan/tahun
Pelaksana,

1. PHPI (.....ttd.....)
2. PHPI (.....ttd.....)

Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pengujian

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN

Nama Pembudidaya :

Alamat :

Tanggal :

No.	Jenis contoh uji	Ukuran/ Umur	Jumlah contoh uji	Populasi	Hasil Uji	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Keterangan: LHU Laboratorium terlampir

Kota, Tgl/bulan/tahun
Ka. UPT

Lampiran 4. Format Laporan Kegiatan Penelusuran Wabah Penyakit
(Tanggap Darurat)

Laporan Kegiatan Penelusuran Wabah Penyakit (Tanggap Darurat)

- I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
- II Metodologi
 - A. Waktu dan Tempat
 - B. Metode Penelusuran Wabah
 - 1. Pengumpulan Data
 - 2. Teknik Pengambilan Contoh Uji
 - 3. Metode Pengujian
- III Hasil Penelusuran
 - A. Data Umum
 - B. Gejala Klinis dan Hasil Pemeriksaan Contoh Uji
 - C. Kondisi Lingkungan
 - D. Penerapan Biosekuriti
 - E. Diagnosa
 - F. Analisis Ketelusuran Wabah Penyakit Ikan
- IV Kesimpulan

Lampiran 5. Kuisisioner Penelusuran Induk dan Benih di Kampung Perikanan Budidaya

Kuisisioner Penelusuran Induk dan Benih di Kampung Perikanan Budidaya

Nama Verifikator : 1.

 2.

 3.

 Tanggal Pelaksanaan :
 No. Surat Tugas :

A.	DATA UMUM PERUSAHAAN		KETERANGAN
	1. Nama Perusahaan	:	
	2. Nama Pemilik	:	
	3. Alamat lokasi budidaya	:	
	4. No. Telp/Hp/email	:	
	5. NIB	:	
	6. KUSUKA	:	
	7. Sertikat CBIB	:	No/masa berlaku/grade
	8. Sertifikasi/lisensi	:	Ditulis nama lisensinya, apabila dalam pengelolaan telah memiliki lisensii/acuan dari lembaga non pemerintah
	9. Kepemilikan	:	Perorangan/Kelompok/Badan Hukum/Sewa/milik sendiri

	10. Jumlah karyawan/SDM	:		
	11. Tingkat pendidikan karyawan/SDM	:		1. Di uraikan masing-masing sesuai tingkat pendidikan dan/atau kompetensi 2. Level KKNI apabila ada
	12. Struktur organisasi	:		Cukup jelas
B	PRODUKSI			
	13. Skala	:		Cukup jelas
	14. Luas budidaya	:	Ha/petak	Cukup jelas
	15. Luas area budidaya sejenis	:	Ha/petak	Cukup jelas
	16. Teknis Budidaya	:	Tradisional/semi intensif/intensif	Cukup jelas
	17. Target size saat panen	:		Cukup jelas
	18. Capaian target size saat panen	:		Cukup jelas
	19. Ukuran benur saat tebar	:		Cukup jelas
	20. Tanggal pemasukan benur/Waktu tebar benur	:		Cukup jelas
	21. Apakah seluruh benur tersertifikasi CPIB	:	No sertifikat	Ditulis benur yang tersertifikasi atau belum tersertifikasi
	22. Apakah seluruh benur tersertifikasi HC/Karantina	:	No HC	Dijelaskan apakah sesuai aturan diperlukan sertifikasi HC/tidak perlu sertifikasi HC (lokal/tidak termasuk lalu lintas MP)
	23. Asal Hatchery/pembenihan	:		
	24. Target umur saat panen	:		Diberikan catatan untuk kondisi terkini dan sebelumnya
	25. Capaian umur saat panen	:		Diberikan catatan untuk kondisi terkini dan sebelumnya
	26. Target produksi per Ha	:		Diberikan catatan untuk kondisi terkini dan sebelumnya

	27. Capaian produksi per Ha	:		Diberikan catatan untuk kondisi terkini dan sebelumnya
	28. Distribusi hasil panen			Diisi nama dan alamat perusahaan penerima
C	KONDISI KLINIS (saat verifikasi)			
	29. Tingkah laku	:		
	30. Warna kulit	:		
	31. Daging	:		
	32. Usus/pencernaan dll	:		
	33. Carapace dan ekor	:		
	34. Hepatopancreas	:		
	35. Tingkat kematian (bila ada)	:		
	36. Informasi lain yang relevan (kronoogis)	:		
D	KONDISI LINGKUNGAN			
	37. Sumber air/Perlakuan	:		
	38. Curah hujan	:		
	39. Suhu	:		
	40. pH	:		
	41. Kadar O ₂	:		
	42. Amoniak/ lainnya	:		
	43. Kekeruhan	:		
	44. Plankton	:		
	45. Informasi lain yang relevan	:		
E.	PEMBUDIDAYAAN		HASIL	KETERANGAN
	46. Apakah perusahaan memiliki Panduan Mutu/SOP budidaya	:	1. Tidak memiliki 2. Memiliki tetapi tidak mencakup seluruh proses produksi 3. Memiliki dan mencakup seluruh proses produksi	1. Diberikan catatan apabila perusahaan belum berCBIB dan apabila telah memiliki SOP maka sumber acuan SOP 2. Disebutkan SOP yang telah dimiliki dan blum dimiliki (apabila belum memiliki diseluruh proses produksi)

	47. Apakah perusahaan menerapkan SOP sesuai Panduan Mutu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan 2. Penerapan SOP sebagian sesuai Panduan Mutu (sebagian proses produksi) 3. Menerapkan seluruh SOP sesuai Panduan Mutu (mencakup seluruh proses produksi) 		1. Disebutkan sumbernya: sesuai sertifikasi (CKIB/CPIB/ CBIB) atau sumber acuan/lisensi lainnya
	48. Apakah perusahaan memiliki rekaman kegiatan pada seluruh proses produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki/tidak sesuai 2. Memiliki rekaman pada sebagian proses produksi 3. Memiliki rekaman pada seluruh proses produksi 		- Disebutkan rekaman yang telah dimiliki dan belum dimiliki (apabila belum memiliki diseluruh proses produksi)
	49. Apakah rekaman kegiatan dilakukan sesuai Panduan Mutu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki/tidak sesuai 2. Sebagian rekaman sesuai 3. Seluruhnya rekaman sesuai pada seluruh proses produksi 		- Disebutkan rekaman yang telah sesuai dan belum sesuai
	50. Apakah rekaman kegiatan dilakukan terhadap seluruh kegiatan budidaya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki/tidak sesuai 2. Dilakukan tidak mencakup seluruh proses produksi 3. Dilakukan mencakup seluruh proses produksi 		- Disebutkan rekaman yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan (apabila belum dilakukan diseluruh proses produksi)
	51. Apakah rekaman kegiatan dapat dilakukan untuk penelusuran/traceability seluruh proses produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki/tidak mampu untuk melakukan penelusuran 2. Mampu untuk melakukan penelusuran pada sebagian produksi 3. Mampu untuk melakukan penelusuran pada seluruh proses produksi 		

	52. Apakah perusahaan hanya menggunakan pakan buatan yang tersertifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pakan buatan tidak tersertifikasi/terregistrasi 2. Sebagian pakan buatan tersertifikasi/terregistrasi 3. Seluruh pakan buatan terregistrasi 		
	53. Apakah perusahaan hanya menggunakan pakan alami yang terkontrol/direkomendasikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pakan alami tidak terkontrol (mandiri)/ 2. Sebagian pakan tersertifikasi/terregistrasi 3. Seluruh pakan terregistrasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan lembaga/instansi pembina atau yang menerbitkan Sertifikasi/register 2. Dijelaskan ketertelusurannya apabila pakan berasal dari LN dan sertifikasinya (rekomendasi dan pelepasannya) 3. Dijelaskan apabila pakan dibuat sendiri/tidak terkontrol atau sejenisnya
	54. Apakah perusahaan hanya menggunakan obat-obatan yang tersertifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh obat2an tidak tersertifikasi/terregister 2. Sebagian obat2an tersertifikasi/terregistrasi 3. Seluruh obat2an terregistrasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan lembaga/instansi pembina atau yang menerbitkan Sertifikasi/register 2. Dijelaskan ketertelusurannya apabila obat berasal dari LN dan sertifikasinya (rekomendasi dan pelepasannya) 3. Dijelaskan apabila obat2an dibuat sendiri/tidak terkontrol atau sejenisnya Catatan obat2an termasuk residu
	55. Apakah perusahaan hanya menggunakan obat-obatan sesuai dosis/peruntukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penggunaan obat2an tidak sesuai dosis/peruntukan 2. Sebagian penggunaan obat2an sesuai dosis/peruntukan 3. Seluruh penggunaan obat2an sesuai dosis/peruntukan 		Cukup jelas
	56. Apakah perusahaan memahami dan menerapkan biosekuriti pada seluruh proses produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan biosekuriti/tidak memahami biosekuriti 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan sumebr acuan penerapan biosekuritinya: CBIB, Lisensi/acuan lain atau mandiri

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Memahami dan menerapkan pada sebagian proses produksi (tidak konsisten) 3. Memahami dan menerapkan pada seluruh proses produksi: terhadap lingkungan, sarana prasarana, personil, media pembawa (konsisten) 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Disebutkan penerapan biosekuriti yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan (pada proses apa)
	57. Apakah perusahaan menerapkan biosekuriti pada lingkungan sudah sesuai standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan biosekuriti /seluruhnya tidak sesuai standar 2. Penerapan biosekuriti sebagian sesuai standar/tidak pada seluruh proses produksi 3. Menerapkan biosekuriti sesuai standar pada seluruh proses produksi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan penerapan biosekuriti yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan 2. Kalau belum sesuai standar dijelaskan ketidaksesuaiannya
	58. Apakah perusahaan menerapkan biosekuriti pada sarana prasarana sudah sesuai standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan biosekuriti /seluruhnya tidak sesuai standar 2. Penerapan biosekuriti sebagian sesuai standar/tidak pada seluruh proses produksi 3. Menerapkan biosekuriti sesuai standar pada seluruh proses produksi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan penerapan biosekuriti yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan 2. Kalau belum sesuai standar dijelaskan ketidaksesuaiannya
	59. Apakah perusahaan menerapkan biosekuriti pada personil sudah sesuai standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan biosekuriti /seluruhnya tidak sesuai standar 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan penerapan biosekuriti yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan 2. Kalau belum sesuai standar dijelaskan ketidaksesuaiannya

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan biosekuriti sebagian sesuai standar/tidak pada seluruh proses produksi 3. Menerapkan biosekuriti sesuai standar pada seluruh proses produksi 		
	60. Apakah perusahaan menerapkan biosekuriti pada benur/ media pembawa sudah sesuai standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerapkan biosekuriti /seluruhnya tidak sesuai standar 2. Penerapan biosekuriti sebagian sesuai standar/tidak pada seluruh proses produksi 3. Menerapkan biosekuriti sesuai standar pada seluruh proses produksi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan penerapan biosekuriti yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan 2. Kalau belum sesuai standar dijelaskan ketidaksesuaiannya
	61. Apakah sering terjadi permasalahan dalam kegiatan budidaya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering 2. Jarang 3. Jarang sekali 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering = terjadi setiap siklus 2. Jarang = 1 tahun 1x 3. Jarang sekali = tidak setiap tahun terdapat permasalahan
	62. Apakah permasalahan tersebut berpengaruh terhadap hasil/produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat berpengaruh 2. Cukup berpengaruh 3. Sedikit atau tidak berpengaruh 		
	63. Apakah penyebab terjadinya permasalahan selama proses budidaya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit/ Media Pembawa (tidak bebas HPIK/HPIT) 2. Lingkungan kurang baik 3. Manajemen/SDM kurang baik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebutkan penyebab permasalahan, termasuk apabila terdapat permasalahan non teknis diluar permasalahan tersebut 2. Permasalahan mencakup yang sedang didapati (tahun 2022) dan sebelumnya 3. Dijelaskan 1 tahun berapa siklus produksi 4. Apabila penyebab permasalahan disebabkan karena penyakit: disebutkan jenis penyakitnya; berasal dari mana;

				penyebabnya; tingkat keparahannya; terjadi pada umur berapa; pengaruhnya terhadap produksi; dll
	64. Apakah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibiarkan 2. Dilakukan perbaikan mandiri 3. Dilaporkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dan dilakukan perbaikan 	- Disebutkan jenis tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak
	65. Apakah terdapat bantuan teknis oleh pihak terkait untuk mengatasi permasalahan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Kadang-kadang 3. Selalu dibantu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan jenis bantuan yang diberikan 2. Disebutkan instansi yang memberikan bantuan
F.	PEMBINAAN BUDIDAYA			
	66. Apakah terdapat pembinaan selama budidaya pembinaaan teknis oleh pihak terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat pembinaan 2. Dilakukan pembinaan tidak rutin/hanya apabila terdapat permasalahan 3. Dilakukan pembinaan secara rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan lembaga/instansi yang memeberikan pembinaan 2. Disebutkan bentuk pembinaan yang diberikan 3. Disebutkan frekuensi pertahun atau per bulannya
	67. Siapakah yang melakukan pembinaan teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada (mandiri) 2. Perusahaan lain/pihak ketiga 3. DJPB, BKIPM, Dinas terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan lembaga/instansi yang memeberikan pembinaan 2. Disebutkan bentuk pembinaan yang diberikan 3. Disebutkan frekuensi pertahun atau per bulannya
	68. Apakah bentuk pembinaan teknis yang berikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Sertifikasi CBIB/SIKI/CKIB 3. Tersertifikasi CBIB/SIKI/CKIB dan dilakukan Inspeksi/Surveilan penyakit/Pengujian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebutkan lembaga/instansi yang memeberikan pembinaan 2. Disebutkan bentuk pembinaan yang diberikan 3. Disebutkan frekuensi pertahun atau per bulannya 4. Disebutkan hasil pembinaannya;

			lain/Monitoring dan sejenisnya		misalnya hasil surveilan positif/negatif (LHU)
	69. Apakah pembinaan teknis dianggap bermanfaat	:	1. Kurang/sedikit bermanfaat 2. Cukup bermanfaat 3. Sangat bermanfaat		- Dijelaskan jenis manfaatnya bagi perusahaan atau terhadap keberhasilan budidaya
	70. Apakah pembinaan teknis sudah dilakukan sesuai ketentuan	:	1. Belum sesuai 2. Sesuai 3. Melebihi ketentuan		1. Dijelaskan antara realisasi dengan ketentuan pembinaan oleh masing-masing lembaga/instansi pembina 2. Dijelaskan bentuk pembinaan dan frekuensi pembinaannya
	71. Apakah pembinaan teknis sudah sesuai harapan pembudidaya	:	1. Belum sesuai/masih kurang 2. Baik/sesuai 3. Sangat baik		1. Dijelaskan antara realisasi dengan yang diharapkan oleh perusahaan
	72. Apakah panen dilakukan dengan mengikuti SOP		1. Tidak memiliki SOP 2. Mengikuti SOP Mandiri 3. Mengikuti yang telah tersertifikasi/lisensi		1. Dijelaskan acuan/lisensi SOPnya 2. Dilihat acuan nya (referensi sesuai acuannya)
	73. Apakah hasil mutu hasil panen dapat diterima baik oleh pembeli		1. Diterima dengan harga dibawah pasar 2. Diterima dengan harga sesuai pasar 3. Diterima dengan harga diatas harga pasar		1. Dijelaskan alasan-alasan mengapa harga hasil panen lebih rendah, sesuai atau lebih tinggi dari harga pasar 2. Dijelaskan kondisi fisik dan penanganan saat pemanennya

Kota, Tgl/bulan/tahun

Verifikator,

1.....

2.....

3.....